

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap daerah pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *good governance*. Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di daerah, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Peran serta masyarakat dalam pemerintah sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal ini pelaksanaan perekonomian Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disyaratkan bahwa kepada tiap-tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) untuk keperluan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah).

Satuan kerja yang memiliki fungsi sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara adalah BPKAD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Disamping sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, BPKAD juga merupakan bendahara umum daerah.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh suatu daerah atau perusahaan dalam mencapai tujuan. Dalam mewujudkan sistem pemerintah yang baik dan tepat, dibutuhkan suatu analisa dan evaluasi.

Penerapan sistem pengendalian internal yang kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu daerah. Oleh karena itu sistem pengendalian internal sangat penting dalam suatu daerah atau perusahaan untuk menjaga kekayaan daerah tersebut. Sistem pengendalian internal tersebut yang merupakan salah satu faktor penentu kepercayaan atau keandalan laporan keuangan yang di yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Pengendalian internal diharapkan mampu menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhir sistem pengendalian internal ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh

masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006:68).

Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Hehanusa, 2015).

Kualitas penyajian laporan keuangan dapat diperkuat juga dari opini BPK. Kualitas terbaik dari laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di dalam mencapai opini WTP, peran dari sistem pengendalian internal yang kompeten sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, proses penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, cepat, dan tentunya data yang dihasilkan harus akurat, maka di dalam hal ini diperlukan adanya keuangan sistem akuntansi dan teknologi

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada para pemangku kepentingannya. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu periode akuntansi. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah dan berguna untuk mengambil keputusan. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan bentuk transparansi dan akuntabilitas, entitas/organisasi kepada masyarakat. Adapun

kriteria dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembentukan kualitas informasi laporan keuangan terdiri dari kualitas penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Pemerintah Daerah memerlukan adanya implementasi sebuah sistem aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan.

Masyarakat di Indonesia menuntut agar pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Demi terciptanya hal tersebut pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik (Superdi, 2017).

Di era reformasi yang terjadi pada negeri ini telah memberikan perubahan pada tatanan pemerintahan. Otonomi daerah merupakan salah satu perubahan tersebut. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan undang-undang No.5 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah, hak, wewenang serta kewajiban diserahkan kepada daerah untuk mengatusera mengurus rumah tangganya. Dalam operasional pemerintahan daerah dibutuhkan pembuatan laporan keuangan sebagai wujud pertanggung jawaban atas pengelolaan dana masyarakat. Hal ini diatur berdasarkan undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengenai keuangan Negara serta undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah.

Asas otonomi daerah mengacu masyarakat meningkatkan tuntutan kepada pemerintah untuk menegakkan pemerintahan yang baik (*good governance goverment*), sehingga tuntutan ini mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan kepada entitas pelaporan dalam pencapaian tujuan yang telah dirapatkan secara periodik Erlina dan Rasdianto (2013:6).

Pengendalian internal bagi suatu daerah merupakan suatu keharusan. Manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa untuk dapat mengawasi operasi organisasi. Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus melangsungkan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah harus mampumempersiapkan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur serta terbuka untuk publik, karena kegiatan pemerintah merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan amanat masyarakat.

Selaku organisasi yang mengelolah dana masyarakat pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban ke publik lewat laporan keuangan yang transparan. Fenomena dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen, dan lembaga-lembaga negara.

Praktek akuntabilitas publik di Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaan keuangan negara, sedangkan dalam kenyataannya keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya oleh

informasi keuangan saja. Masyarakat ingin mengetahui lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan memenuhi prinsip *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan kinerja organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi (*spending less*), efisiensi (*spending well*), dan efektivitas (*spending wisely*).

Pemerintah yang belum melaksanakan akuntabilitas secara maksimal untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini disebabkan laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan. Masyarakat menuntut adanya aksesibilitas yang mudah dan terpercaya. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan daerah. Akuntabilitas yang efektif bergantung pada kemudahan akses publik terhadap laporan keuangan organisasi sektor publik yang dapat dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah Mardiasmo (2006:2).

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah No 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan

Pemerintah. Tujuan umum laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2019:161) adalah kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan informasi otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat dan gambaran. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab pengelola organisasi. Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk menghasilkan informasi yang relevan, laporan keuangan mempunyai beberapa karakteristik sesuai peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana sebuah laporan keuangan harus memiliki karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan karakteristik di atas, dapat di pahami dengan jelas standar kualitas laporan keuangan yang berlaku secara umum. Hal ini dapat menghasilkan pertanyaan selanjutnya, apakah laporan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai standar yang berlaku? Apakah pencatatan keuangan pemerintah daerah sudah mengikuti prinsip akuntabilitas sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu kita pahami bahwa setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melakukan penilaian atas laporan keuangan pemerintah, penilaian tersebut tentu dijalankan sesuai standar dan kriteria yang berlaku hingga akhirnya menghasilkan opini terhadap laporan keuangan pemerintah. Adapun empat opini yang diberikan

pemeriksa, yakni: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WYP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (TMP), dan Opini Tidak Wajar (TW).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.
2. Apakah Transparansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan
2. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berguna sebagai penambah pengetahuan dan sebagai alat ukur kemampuan teori yang didapat dari perkuliahan mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Tentunya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis. selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama dibangku kuliah dengan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat memberikan kontribusi dan masukan-masukan yang berguna bagi Pemerintah Daerah terkait dengan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi bermanfaat dan juga sebagai referensi bagi pembaca khususnya di sekto rakuntansi.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pembahasan mengenai batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan, sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan mudah. Batasan masalah dalam penelitian ini sangat penting dan mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas agar tidak terjadi simpangsiur dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah masalah Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Internal

Setiap organisasi yang ada termasuk pemerintah membutuhkan suatu alat pengendalian yang dapat menjamin bahwa aktivitas organisasi telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Adapun sistem pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan serta meminimalkan hal-hal yang terjadi di luar rencana, meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, meningkatkan keandalan data dalam laporan keuangan serta mendorong dipatuhinya hukum dan aturan yang diterapkan. Maka dari itu sistem pengendalian internal memiliki kedudukan yang sangat penting.

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk melindungi kekayaan organisasi, mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan proses, metode, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan anggota lainnya untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163).

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Adapun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut UU No. 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Teori Sinyal (*Signaling Theory*) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah oleh rakyat akan memberikan sinyal kepada publik dengan menyediakan laporan keuangan yang andal (Monika, dkk. 2016). Laporan keuangan yang semakin andal dan penerapan SPI yang semakin baik merupakan bentuk sinyal yang baik dari pemerintah kepada para pengguna laporan keuangan (Hendriyani dan Tahar, 2015).

Menurut Mardiasmo (2009) sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015).

Berdasarkan *Internal Control-Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*

(2015), Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personel-personel lainnya yang dirancang guna memberikan keyakinan penuh tentang mengenai pencapaian tiga tujuan berikut ini yaitu : 1) Keandalan dari pelaporan keuangan; 2) Efektivitas dan efisiensi operasi; 3) Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Konsep-konsep dasar yang terkandung dalam devinisi *COSO* yaitu : a) Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian inter juga terdiri dari serangkaian penjagaan yang terikat dan terintegrasi dalam infastruktur suatu usaha; b) Pengendalian intern juga dipengaruhi oleh manusia; c) Pengendalian intern juga diharapkan mampu memberikan keyakinan penuh bagi manajemen dan komisaris satuan usaha karna adanya kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian intern serta manfaat yang berhubungan dengan penerapan pengendalian tersebut; d) Pengendalian intern merupakan alat untuk mecapai tujuan dalam berbagai hal yang saling bersangkutan satu sama lain yaitu laporan keuangan, operasi dan kesesuaian.

2.1.2 Komponen-Komponen Pengendalian Internal

Berdasarkan *Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission*(COSO).Pengendalian Internal satuan usaha terdiri ataskomponen-komponen berikut : 1)Lingkungan pengendalian; 2) Penaksiran risiko; 3) Informasi dan komunikasi; 4) Aktivitas pengendalian;5) Pemantauan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperoleh ma unsur sebagai berikut : 1)

Pengendalian Lingkungan; 2) Penaksiran Resiko; 3) Informasi dan Komunikasi; 4) Kegiatan Pengendalian; 5) Pemantauan Pengendalian Intern.

2.1.3 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2013:163), tujuan sistem pengendalian internal adalah : Menjaga kekayaan organisasi, Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, Mendorong efisiensi, dan Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Lima tujuan pengendalian internal antara lain : 1) Dapat dipercaya setra kejujuran informasi, Informasi merupakan barang ekonomi yang kadang bernilai tinggi dan kadang nilainya tidak terlalu tinggi, pengendalian internal dilakukan salah satu tujuannya ialah untuk memberi kepercayaan penuh bahwa informasi yang disajikan oleh organisasi yang menerapkan pengendalian internal dapat dipercaya oleh penerima informasi; 2) ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur serta undang-undang yang berlaku. Adapun tujuan dari pengendalian internal ialah memastikan bahwa suatu operasi berjalan dengan baik, sistematis serta beruntun, selain itu tujuan dari pengendalian ini juga dapat menilai bahwa kegiatan yang telah dilakukan tidak keluar dari aturan dan norma hukum yang berlaku; 3) pengjagaan keamanan aktiva, pengendalian yang paling nyata adalah design dan implementasi untuk melindungi aset negara/daerah. Pengendalian ini mencakup kunci-kunci setiap akses pintu keluar/masuk, petugas keamanan, pasword komputer dll; 4) ekonomi dan efisiensi kegiatan, berlandaskan hukum kelangkaan yang menyatakan bahwa jumlah sumber daya memang sangat terbatas. Begitu pula dengan jumlah anggaran pemerintah yang sangat terbatas dan harus dialokasikan dengan tepat agar tidak terjagi penyalahgunaan anggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun pengendalian internal ini

diharapkan bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan ekonomis dan efisien; 5) Efektivitas pencapaian tujuan, pusat seluruh pengendalian dan organisasi secara keseluruhan harus pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pengendalian internal memegang peranan yang penting karena pengendalian internal ini diharapkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dapat dengan mudah terlaksana.

Penerapan sistem pengendalian internal bermaksud untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, penyelewengan, penghambatan, pemborosan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sarana serta penerapan tugas-tugas organisasi. Tujuan pengendalian internal juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan manajerial guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan keterkaitan dalam pencapaian tujuan serta pelaksanaan tugas organisasi.

2.2 Transparansi Keuangan Daerah

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, yaitu : 1) Komunikasi publik oleh pemerintah, merupakan suatu kompleksitas pilihan-pilihan yang dinyatakan oleh banyak orang yang berkaitan dengan sesuatu isu yang dipandang penting oleh umum; 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi, Informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dalam segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Menurut Schiavo-Campo and Tomasi (1999) yang dikutip Mardiasmo (2006) pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama transparansi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Pada masa ini, Pemerintah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Persepsi adanya transparansi pada laporan keuangan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria sebagai berikut : 1) Pemerintah daerah mempunyai sistem informasi keuangan daerah yang memungkinkan laporan keuangannya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, misalnya melalui internet; 2) Pertanggungjawaban laporan keuangan oleh kepala daerah kepada DPRD akhir

tahun bersifat terbuka untuk masyarakat umum; 3) Laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya sekedar dapat diakses (diketahui/diperoleh) oleh DPRD dan auditor, tetapi juga oleh masyarakat luas; 4) Laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK diumumkan/dipublikasikan di media masa; 5) Selain DPRD dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), masyarakat juga mempunyai hak (pada tingkat tertentu) untuk mengetahui hasil pemeriksaan (audit) laporan keuangan yang telah di periksa (auditor) independen; 6) Hasil kinerja keuangan dan non keuangan pemerintah daerah selama periode tersebut tersedia untuk umum.

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik, ekonomi pemerintah, dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholder* dalam melihat struktur dan fungsi pemerintah, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggung jawaban periode lalu. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2001). Transparansi keuangan daerah merupakan pertanggung-jawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media agar penyajian laporan keuangan agar dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan serta berhak mengetahui informasi tersebut.

Keberhasilan transparansi pemerintah daerah ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut : 1) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah adalah bersih dan berwibawa; 2)

Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; 3) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan; 4) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari suatu prosedur pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang berlangsung selama satu periode buku yang bersakutan serta merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap karya atas penyelenggaraan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian suatu kinerja serta pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan FASB dalam SFAC No. 1 menyebutkan bahwa “Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain”.

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menilai akuntabilitas dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, serta politik dengan :

- 1) Menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2) Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan guna membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan membiayai keseluruhan kegiatannya serta mencukupi kebutuhan kasnya;
- 4) menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 5) Menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007: 3) tujuan dari laporan keuangan adalah:

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi;
- 2) Memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna;
- 3) Menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, peranan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan

terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penyusunan laporan keuangan secara umum adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan suatu entitas agar dapat diketahui nilai sumber daya ekonomi yang terpakai, dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas, juga menilai kondisi keuangan, serta menentukan ketaatan entitas terhadap perundang-undangan sehingga dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan.

2.3.2 Tujuan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi

mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran; e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Keuangan Daerah, Kualitas Penyajian Laporan Keuangan memang banyak diteliti sekarang ini, terutama para mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi akhirnya pada perguruan tinggi. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dianggap sama dengan penelitian yang saya angkat sekarang ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Emy Dwi Tristiani, moh. Dimiyati, Hadi Paramu (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penetausahaan Aset Tetap	Variabel independen: Sistem Pengendalian Intern Variabel dependem: Keandalan Laporan Keuangan	Metode Kuantitatif	Terdapat pengaruh signifikan positif antara Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandaalan Laporan Keuangan.
2	Ni Made Asih Ristanti, Ni Kadek Sinarwati, dan Edi Sujana (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian	Variabel independen : Sistem Pengendalian Intern, pengelolaan keuangan Daerah, Komitmen	Metode Kuantitatif	Sistem Pengendalian Intern , Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi secara

	Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten	Organisasi Variabel dependen : Penerapan Good Governance		simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan <i>good governance</i>
3	Sukma Selviani Tolley, Ridwan dan Muh. Yunus Kasim (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern Variabel dependen : Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Metode Sensus	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4	Rusda Irawati, Ardhila dan Kamalita Sari (2017) Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang di PT. Unisem Batam	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Internal Variabel dependen : Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang	Metode Deskriptif Kualitatif	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran barang.
5	Irine Chintya (2015) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Variabel independen : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Variabel dependen : Kinerja Instansi Pemerintah	Metode Kuantitatif	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok.

	terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi pada SKPD Kota Solok)			
6	Juliana Tandililing (2019) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah terhadap Motivasi Mengajar Guru di Kabupaten Keerom	Variabel independen: Transparansi Keuangan, Akuntabilitas Keuangan Sekolah Variabel dependen: Motivasi Mengajar Guru	Metode Kuantitatif	Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah di Kabupaten Keerom berpengaruh positif terhadap Motivasi Guru.
7	Lucy Auditya dan Husaini Lismawati (2013) Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemeintah Daerah	Variabel Independen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Transparansi Pengelolaan Keuangan Variabel dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	Metode Kuantitatif	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu.
8	Henny Hendratmi, JMV Mulyadi dan Tri Widiastuti (2017) Pengaruh Transparansi dan Komitmen terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran	Variabel Independen: Transparansi, Komitmen Variabel dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran	Metode Kualitatif	Secara simultan Transparansi dan Komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran.
9	Luh Kadek Sri Megewati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edi Sujana (2015) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah,	Variabel independen: Sistem Akuntansi Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel dependen: Kualitas Laporan	Metode Kuantitatif	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan

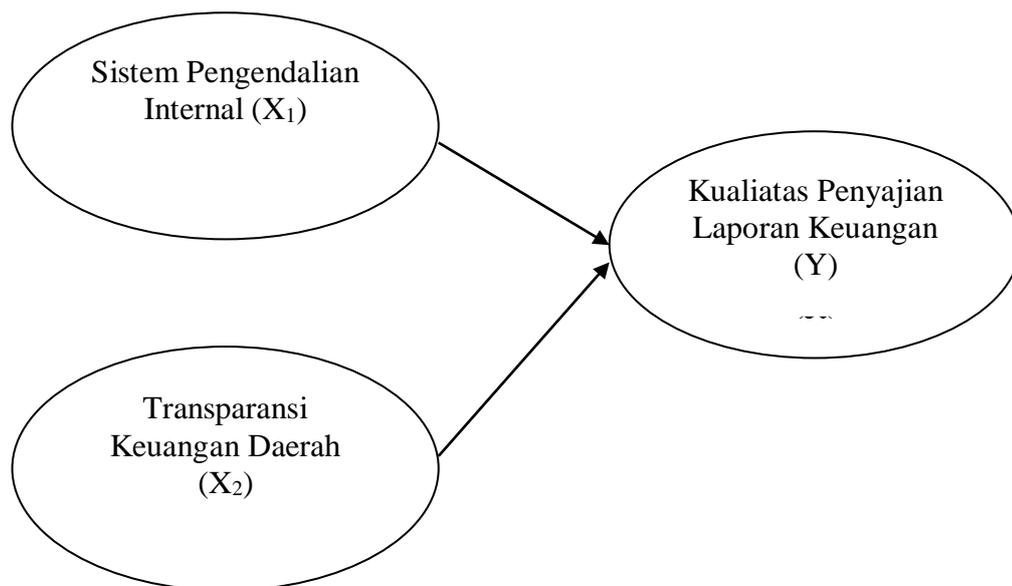
	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)	Keuangan		Keuangan Daerah.
10	Rukmi Juwita (2013) Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel independen : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Metode Survey	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
11	Verliani Dasmaran, Tri Yulaeli dan Selfiani (2017) Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Aset Daerah	Variabel Independen : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Metode Evaluasi Sumatif	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Aset Daerah .
12	Dewi Kusuma Wardani dan Rati Ranika Putri Utami (2020) Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa	Variabel independen : Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat Variabel dependen : Kesejahteraan Masyarakat	Metode Statistik Deskriptif	Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, <i>sedangkan</i> Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat.

	Sidoarjo			
13	Erick Try Putra Benawan, David P.E Saerang, Wiston Pontoh (2018) Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Pegawai (studi kasus pada dinas perhubungan Kota Tidore Kepulauan)	Variabel independen : Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi Keuangan Variabel dependen : Kinerja Pegawai	Metode Kuantitatif	Pengawasan, Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai <i>sedangkan</i> Transparansi Keuangan memiliki pengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.
14	Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual)	Variabel independen : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Metode Survey	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
15	Emilda Ihsanti (2014) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Variabel independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel dependen : Kualitas Laporan	Metode Kuantitatif	Kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, <i>sedangkan</i> Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

		Keuangan Daerah		tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
--	--	-----------------	--	--------------------------------------------------------------------

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengidentifikasi tiga variabel yaitu Sistem Pengendalian Internal (X_1), Transparansi Keuangan Daerah (X_2), dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y). Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap kualitas penyajian laporan keuangan

Teori Sinyal (*Signaling Theory*) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah oleh rakyat akan memberikan sinyal kepada publik dengan menyediakan laporan keuangan yang andal (Monika, dkk. 2016). Laporan keuangan yang semakin andal dan penerapan SPI yang semakin baik merupakan bentuk sinyal yang baik dari pemerintah kepada para pengguna laporan keuangan (Hendriyani dan Tahar, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa salah satu tujuan SPI adalah keandalan laporan keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dari kesesuaian dengan SAP dan SPI, maka pemerintah daerah harus mendesain dan melaksanakan SPI yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan.

Hasil penelitian Afiah dan Azwari (2015), Widyaningsih dkk. (2011), Desmiyawati (2014), dan Sari dan Witono (2014) menunjukkan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H₁ : Diduga bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

2.6.2 Pengaruh transparansi keuangan daerah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan

Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif Kondisi yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan secara tidak langsung pengelola pemerintahan berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat dengan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi (Rahmanurrajjid, 2008:86).

Hasil penelitian menurut Lucy Auditya dan Husaini Lismawati (2013), Henny, dkk (2017), Juliana Tandililing (2019) dan Trisnani, Ddkk(2018) yang menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₂ : Diduga bahwa Transparansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan penelitian yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah mulai dari penyusunan usulan penelitian sampai terlaksananya laporan penelitian atau selama dua bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh jumlah pegawai pada kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara berjumlah 55 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti dan dianggap mewakili keseluruhan populasi. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampel yaitu daftar dari semua unsur sampel dalam populasi

sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Kantor BPKAD Kabupaten Luwu utara yaitu sebanyak 55 Responden.

1. Distribusi Data Sampel Penelitian

Adapun gambaran sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1Data Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	55	100%
2.	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3.	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	55	100%

Sumber: Data yang diolah 2020

Berdasarkan tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa dari jumlah 55 kuesioner yang telah disebar menghasilkan pengembalian kuesioner secara keseluruhan yaitu 55 kuesioner penelitian.

2. Deskripsi Data Responden

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel yaitu pegawai yang bekerja di Kantor BPKAD yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Utara, yang bersedia untuk turut serta dalam penelitian ini sebanyak 55 responden. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner secara langsung kepada responden pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara.

1) Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.2 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 3.2 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
1	Laki-laki	27	49,1
2	Perempuan	28	50,9
Jumlah		55	100

Sumber: Data yang diolah 2020

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 27 orang atau 49,1% responden berjenis kelamin laki-laki dan 28 orang atau 50,9% responden perempuan.

2) Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3.3 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia.

Tabel 3.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden	Presentase
1	31-40 Tahun	27	49,1
2	41-50 Tahun	26	47,3
3	>51 Tahun	2	3,6
Jumlah		55	100

Sumber: Data yang diolah 2020

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa responden yang bekerja pada kantor BPKAD mayoritas berumur 31-40 tahun 27 orang atau sebesar 49,1%,selanjutnya yaitu berusia 41-50 tahun 26 orang atau sebesar 47,3%, sisanya berusia >512 orang atau sebesar 3,6%.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Sedangkan, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data asli (tanpa

melalui perantara). Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner oleh responden, artinya data primer yang diperoleh adalah hasil pengisian koesioner oleh responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data yang valid dan akurat yang dapat di pertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pemecahan masalah. Menurut Sugiyono (2010:401) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner agar diperoleh data yang relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan data melalui metode kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi Keuangan Daerah sehingga, dapat diketahui Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.6.1 Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengukur pertanyaan atau persyaratan yang ada dalam kuesioner

atau pernyataan dianggap valid jika pernyataan tersebut mampu mengungkap apa yang ingin diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2009:63). Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan skor untuk masing-masing variabel. Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang diukur dalam penelitian. Tingkat validitas kuesioner diukur berdasarkan koefisien validitas yang dalam hal ini menggunakan koefisien korelasi pearson.

Uji validitas dilakukan untuk mengukur pertanyaan atau persyaratan yang ada dalam kuesioner atau pernyataan dianggap valid jika pernyataan tersebut mampu mengungkap apa yang ingin diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2009:63). Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan skor untuk masing-masing variabel. Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang diukur dalam penelitian. Tingkat validitas kuesioner diukur berdasarkan koefisien validitas yang dalam hal ini menggunakan koefisien korelasi pearson. Proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SPSS versi 22*.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliabel

atau tidak. Kuesioner dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut dilakukan pengukuran ulang, maka akan mendapatkan hasil yang sama.

Uji reliabilitas pada dasarnya untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data pada dasarnya menunjukkan ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuisisioner dalam mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuisisioner jika digunakan dari waktu ke waktu). Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Jika nilai koefisien alpha sama dengan atau lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal atau reliabel. Koefisien korelasi antara dua kelompok tersebut menunjukkan kehandalan internal alat ukur yang digunakan. Proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SPSS versi 22*.

Sekumpulan pertanyaan untuk mengukur suatu variabel dikatakan reliabel dan berhasil mengukur dimensi variabel yang kita ukur jika koefisien reliabilitasnya minimal 0,5 atau 0,6.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian dinaikkan skala ukurannya menjadi skala *interval/ratio*. Maka tahap selanjutnya adalah diolah dan dianalisis secara statistik dengan menggunakan regresi linear berganda dan uji hipotesis. Sistematis dari

pengolahan ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji regresi linear berganda untuk mengetahui tes yang instrumen yang digunakan apakah berdistribusi normal atau tidak. Kemudian dalam uji hipotesis penelitian, peneliti menggunakan rumus regresi dan korelasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.

3.7.1 Persamaan Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi linier untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu (Suharyadi dan purwanto, 2004:508) Penggunaan teknik ini karena dalam penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Kualitas Penyajian Laporan Keuangan) dan dua variabel independen (Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi Keuangan Daerah) model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2011: 261) adalah :

Dimana :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y : Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

X₁: Sistem Pengendalian Internal

X₂:Transparansi Keuangan Daerah

b : Angka arah atau koefisien regresi

a : *Intercept* atau konstanta

e :Error

3.7.2 Pengujian Hipotesis

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi sederhana, data tersebut harus diuji kenormalannya. Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variable dependen dan independen berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Pengujian asumsi normalitas tersebut dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis sebagai berikut:

Ho : Data variabel dependen berdistribusi normal.

Ha : Data variabel dependen tidak berdistribusi normal.

Kriteria uji : Tolak Ho jika nilai signifikansi yang diperoleh kecil dari α , terima Ha dalam hal lainnya. Untuk pengujian ini digunakan jasa komputer berupa *software* dengan program *SPSS (Statistical Package for Social Science) for windows version 22*.

Setelah dilakukan pengujian normalitas tahap selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis bertujuan menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen yaitu Penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja daerah sebagai variabel dependen. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi linear sederhana(Uji t).

Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

H₀: $\beta = 0$, Sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Ha : $\beta \neq 0$, Sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}(n-k-1)$ maka H_0 ditolak,

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}(n-k-1)$ maka H_0 diterima

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi R^2

Untuk mengukur besarnya proporsi atau presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian koefisien determinan. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 = R = 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.8 Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah karakteristik dari objek yang akan di observasi, dipelajari, dan ditarik kesimpulan darinya. Adapun variabel yang dianalisis dalam penelitian ini sbb :

3.8.1 Variabel bebas atau *independent variable* (X₁)

Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses, yang dikendalikan oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

3.8.2 Variabel bebas atau *independent variable* (X₂)

Transparansi Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

3.8.3 Variabel terikat atau *dependent variable* (Y)

Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat diukur berdasarkan karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat BPKAD Luwu Utara

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai rencana strategi yang meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabel pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini mencakup pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran. Adapun visi dan misi BPKAD Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

4.1.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Luwu Utara

1. Visi

“Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi publik”.

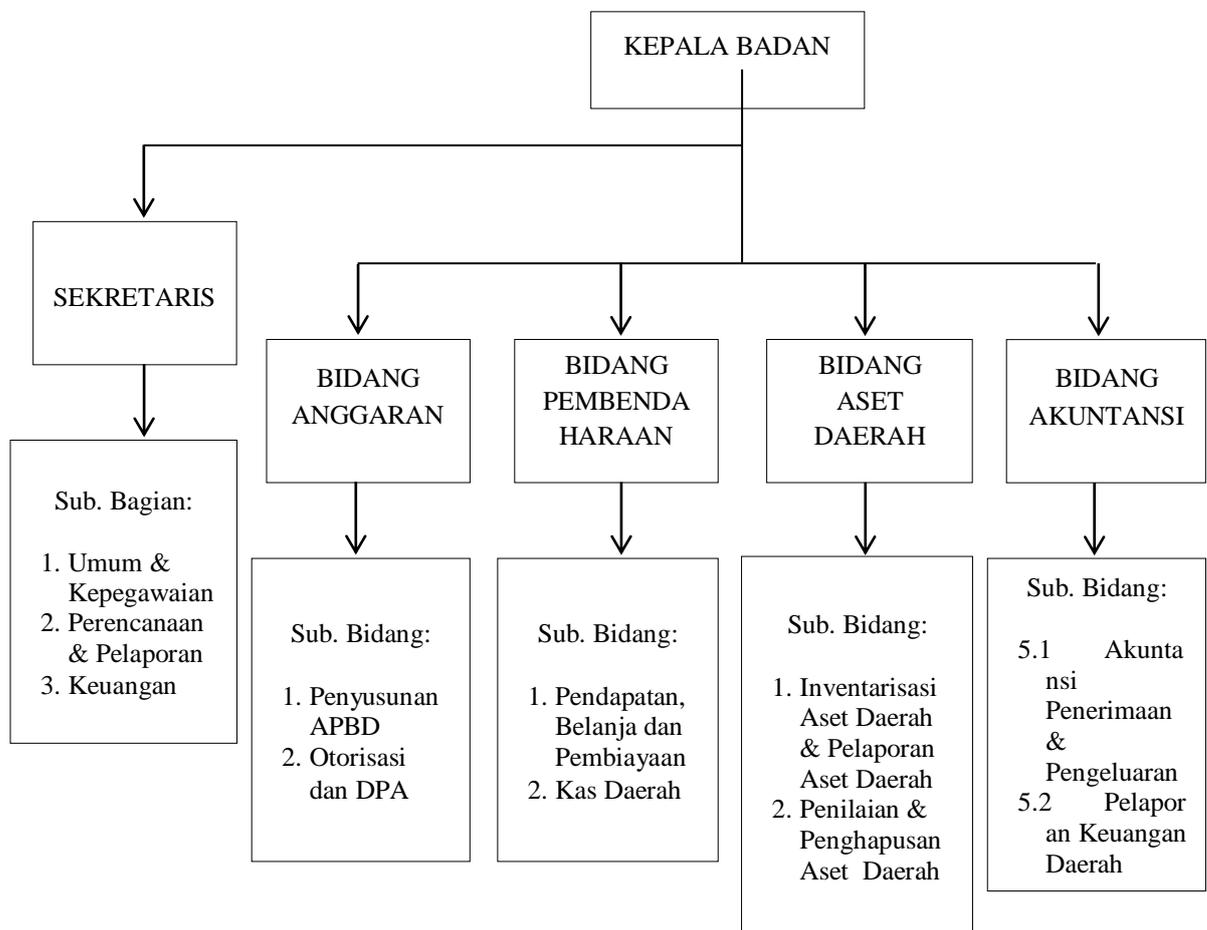
2. Misi

- Mewujudkan penatausahaan dan pengelolaan kas keuangan daerah yang efektif, efisien dan optimal.
- Memacu pengelolaan APBD yang berkualitas, berorientasi publik, berkelanjutan dan berkeadilan.
- Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dalam meningkatkan kinerja Pemda Kab. Luwu Utara.
- Penyajian informasi keuangan daerah melalui laporan keuangan Pemerintah Daerah yang akurat, komprehensif dan akuntabel.

- Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Struktur Organisasi

Adapun stuktur orgniasasi BPKAD Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Stuktur Organisasi BPKAD Kabupaten Luwu Utara

4.2 Deskripsi Statistik

4.2.1 Uji Instrumen Data

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Sistem Pengendalian Internal (SPI), Transparansi Keuangan Daerah (TKD) dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (KLK).

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
1. (SPI1)	,519**	,000	Valid
2. (SPI2)	,606**	,000	Valid
3. (SPI3)	,581**	,000	Valid
4. (SPI4)	,783**	,000	Valid
5. (SPI5)	,568**	,000	Valid
6. (SPI6)	,817**	,000	Valid
7. (SPI7)	,685**	,000	Valid

Sumber: Data yang diolah 2020

Tabel 4.1 Menunjukkan variabel sistem pengendalian internal mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil 0,05.

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Transparansi Keuangan Daerah

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
1.(TKD1)	,838**	0,000	Valid
2.(TKD2)	,741**	0,000	Valid
3.(TKD3)	,768**	0,000	Valid
4.(TKD4)	,884**	0,000	Valid
5.(TKD5)	,721**	0,000	Valid
6.(TKD6)	,562**	0,000	Valid

Sumber: Data yang diolah 2020

Tabel 4.2 Menunjukkan variabel transparansi keuangan daerah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil 0,05.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
1.(KLK1)	,627*	0,000	Valid
2.(KLK2)	,737**	0,000	Valid
3.(KLK3)	,644**	0,000	Valid
4.(KLK4)	,674**	0,000	Valid
5.(KLK5)	,695**	0,000	Valid
6.(KLK6)	,757**	0,000	Valid
7.(KLK6)	,728**	0,000	Valid

Sumber: Data yang diolah 2020

Tabel 4.3 Menunjukkan variabel kualitas penyajian laporan keuangan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil 0,05.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0,6. Tabel 4.4 Menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk 3 variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	0,758	Reliabel
Transparansi Keuangan Daerah	0,842	Reliabel
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan	0,800	Reliabel

Sumber: Data yang diolah, 2020

Tabel 4.4 Menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,758, transparansi keuangan daerah sebesar 0,842 dan variabel kualitas penyajian laporan keuangan sebesar 0,800. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan

kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

4.2.2 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri atas duavariabel independen dan satu variabel dependen. Untuk mengetahui pola hubungan antar variabel, maka akan diuji tiga hipotesis yang telah diajukan sebelumnya menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Tabel 4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,208	3,815		1,890	,064
	Sistem Pengendalian Internal	,272	,102	,282	2,669	,010
	Transparansi Keuangan Daerah	,603	,116	,549	5,192	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Penyajian Laporan Keuangan
Sumber: Pengolahan data SPSS 2020

Rumus yang didapatkan dari hasil pengujian:

$$Y = 7,208 + 0,272X_1 + 0,603X_2 + e$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar 7,208 artinya apabila sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah sama dengan nol, maka

kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara tetap sebesar 7,208.

- 2) Variabel sistem pengendalian internal memiliki koefisien regresi sebesar 0,272. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel sistem pengendalian internal dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,272 atau 27,2%.
- 3) Variabel transparansi keuangan daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0,603. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel transparansi keuangan daerah, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,603 atau 60,3%.

1. Uji-t (Parsial)

Uji ini digunakan untuk meneliti pengaruh apakah sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai *probability t* lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai *probability t* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.6 Hasil Uji t (Parsial)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,208	3,815		1,890	,064
	Sistem Pengendalian Internal	,272	,102	,282	2,669	,010
	Transparansi Keuangan Daerah	,603	,116	,549	5,192	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Sumber: Pengolahan data SPSS 2020

- 1) Uji Hipotesis 1: Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.6, variabel sistem pengendalian internal memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t_{hitung} positif 2,669 yang lebih besar dari t_{tabel} 2,004, sehingga variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan dan dapat dikatakan bahwa H_1 mendukung hasil penelitian, hal ini menunjukkan apabila sistem pengendalian internal ditingkatkan maka kualitas penyajian laporan keuangan juga akan meningkat.

- 2) Uji Hipotesis 2: Pengaruh transparansi keuangan daerah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.6, variabel transparansi keuangan daerah memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t_{hitung} positif 5,192 yang lebih besar dari t_{tabel} 2,004, sehingga variabel transparansi keuangan daerah berpengaruh

positif signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan dan dapat dikatakan bahwa H₂ mendukung hasil penelitian, hal ini menunjukkan apabila transparansi keuangan daerah meningkat maka kualitas penyajian laporan keuangan juga akan meningkat.

2. Hasil Uji Koefisien determinasi

Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,694 ^a	,482	,462	1,63981

a. Predictors: (Constant), Transparansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal

Sumber: Pengolahan data SPSS 2020

Hasil Analisis uji koefisien determinasi tersebut dapat terlihat pada tabel 4.7 dari adjusted R Square sebesar 0,462 menunjukkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan diperjelas oleh 2 variabel yaitu sistem pengendalian internal dan tranparansi keuangan daerah sebesar 46,2% sisanya 53,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan dan diskusi hasil penelitian

4.3.1 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif dalam penelitian ini, maka didapatkan hasil temuan yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya hasil pernyataan tersebut maka pertanyaan permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini

dapat dibuktikan dan hal ini sesuai dan konsisten dengan hipotesis pertama (H₁) yang dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa sistem pengendalian internal merupakan metode atau proses dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163). Dengan demikian, hasil penelitian dan didukung dengan berbagai teori dapat disimpulkan jika semakin tinggi, baik dan besar sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh aparat pemerintah meningkat maka berkontribusi semakin baik pula kualitas penyajian kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Temuan ini secara empiris didukung oleh fakta bahwa berdasarkan dari hasil pengisian kuesioner yang ditelaah dijawab oleh responden, yang dimana aparat pemerintah daerah telah menerapkan kelima komponen dari sistem pengendalian internal menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang memadai akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sebaliknya jika sistem pengendalian internal lemah maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini membuktikan teori Sinyal (*Signaling Theory*), PP Nomor 60 tahun 2008 dan mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Emy, dkk (2017), Ristanti, dkk (2014), Tolley, dkk (2017) dan

Chintya (2015) yang menyimpulkan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati, (2013) dan Irawati, dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

4.3.2 Pengaruh transparansi keuangan daerah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan pada hasil pengolahan data kuantitatif dalam penelitian ini, maka didapatkan hasil temuan yang menyatakan bahwa transparansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya hasil pernyataan tersebut maka pertanyaan permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dibuktikan dan hal ini sesuai dan konsisten dengan hipotesis kedua (H₂) yang dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu transparansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa transparansi adalah dalam bahasa lain diartikan keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi Mardiasmo (2009). Dengan demikian, hasil penelitian dan didukung dengan berbagai teori dapat disimpulkan bahwa jika semakin baik transparansi yang dipraktekkan atau diimplementasikan oleh aparat pemerintah meningkat

maka akan berkontribusi pada semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Transparansi khususnya masih menjadi aspek yang sangat berat dan sulit dilakukan oleh aparat pemerintah saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya *fraud* atau kecurangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik. Pada hakekatnya transparansi dapat dibangun atas dasar kebebasan arus informasi proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dimonitor oleh semua pihak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian menurut Lucy Auditya dan Husaini Lismawati (2013), Henny, dkk (2017), Juliana Tandililing (2019) dan Trisnani, Ddkk(2018) yang menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan, berbeda dengan penelitian menurut Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020) dan Nasution, (2018) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara.
2. Transparansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kabupaten Luwu Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumber pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu akuntansi sektor publik, serta kontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan daerah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah, serta sebagai masukan dan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan.

3. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel yang lebih banyak lagi, sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan kualitas laporan keuangan menjadi lebih kuat.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penarapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93-111.
- Afiah, N.N. dan P.C. Azwari. 2015. The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and Its Impact on the Principles of Good Governance: A Researh in District, City, and Provincial Government In South Sumatera. Global Conference on Business and Social Science. 17-18 September 2015. Procedia-Social and Behavioral Sciences Elsevier: 811-818.
- Auditya, L., & Husaini, L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemeintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-41.
- Benawan, E. T. P., Saerang, D. P., & PONTOH, W. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Pegawai (studi kasus pada dinas perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Chintya, I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studipada SKPD Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- COSO,(2015), *Internal Control Integrated Framework*, New York : AIGPA's Publication Division
- Dasmaran, V., Yulaeli, T., & Selfiani. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Marantha*, Vol.10, No.2, :170-178.
- Desmiyawati. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 2 (April): 163-178
- Erlina dan Rasdianto, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Penerbit Brama Ardian, Medan
- Hehanusa, S. J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon. *Conference in Business, Accaounting, and Management*, Vol.2 No.1, 82–90.
- Hendratmi, H., Mulyadi, J. M. V., & Widiastuti, T. (2017). Pengaruh Transparansi dan Komitmen terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(2), 76-93.
- Hendriyani, R., dan A.Tahar. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah propinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(Maret): 25-33.

- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Irawati, R., & Satri, AK (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang di PT. Unisem Batam. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(2), 183-193.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201-214.
- Krismiaji. (2015). Sistem Informasi Akuntansi. In *Edisikeempat*.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 : 1. (1-17).
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*, Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V ANDI.
- Mardiasmo. (2001). Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* , 441.
- Megewati, L. K. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Edi Sujana, S.E. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Monika, P., A.Syahroza, dan V. Diyanti. 2016. The Effect of Audit Opinion and Corruption on Local Government Performance. *Simposium Nasional Akuntansi 19*. Universitas Lampung: 1-26.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162. Retrieved from <https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 Tentang Anggaran Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Nuansa Aulia.
- Rahmanurrajjid, Amin. (2008). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan*.
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., & Edi Sujana, S. E (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance. (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Sari, S.P. dan B. Witono. 2014. Keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Seminar Nasional dan Call for Paper Research Methods and Organizational Studies, 418-425
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tandililing, J. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah terhadap Motivasi Mengajar Guru di Kabupaten Keerom. *KEUDA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* 4(2).
- Trisnani, E. D., Dimiyati, M., & Paramu, H. (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. *BISMA*, 11(3), 271-282.
- Tolley, S. S (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 5(2).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 1974. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengeruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha* 28(1), 35-50.

Widyaningsih, A., A. Triantoro, dan L.S. Wiyantoro. 2011. Hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan : Kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening (Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi Jawa Barat. Simposium Nasional Akuntansi 14. Universtas Syiah Kuala Banda Aceh: 1-35.

(<https://www.luwuutarakab.go.id>)